



## Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur

Amelia Diva Effendy\*, Diana Hertati  
UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia  
\*20041010066@student.upnjatim.ac.id

### Abstract

*Around 12% of unemployment in Indonesia is dominated by Diploma and Bachelor graduates. This is because there is no link and match. Therefore, in 2020 the Ministry of Education and Culture released the Independent Campus Learning (MBKM) policy. The aim of this research is to determine the implementation of the MBKM Policy through the MSIB Program in Certified Internship Activities at the Faculty of Agriculture, UPN "Veteran" East Java. The theory used is the implementation of policies by Edward III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses qualitative methods with descriptive research type. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation. The research results show that first, the communication focus still needs to increase clarity and consistency in the coordination process of policy implementers so that it has not been implemented well. Second, the focus on resources still requires an increase in the number of PT Coordinator staff so that it has not been implemented well as a whole. Third, the focus of disposition, namely cognition, implementing responses, and response intensity can be said to have been implemented well as a whole. Fourth, the focus of the bureaucratic structure is that there are implementation SOPs that have not been implemented so they have not been implemented properly. Therefore, it can be concluded that the implementation of the MBKM policy of the MSIB program in Certified Internship activities at the Faculty of Agriculture, UPN "Veteran" East Java has not been implemented well.*

**Keywords:** *Implementation; MBKM; MSIB; Internship*

### Abstrak

Sekitar 12% pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan Diploma dan Sarjana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya link and match. Oleh karena itu, pada tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim merilis kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada Kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui laporan, berita online, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, fokus komunikasi masih perlu adanya peningkatan kejelasan dan konsistensi dalam proses koordinasi para pelaksana kebijakan sehingga dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi namun belum dilakukan dengan baik. Kedua, fokus sumber daya masih perlu adanya penambahan jumlah staf Koordinator PT sehingga dapat dinyatakan belum terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Ketiga, fokus disposisi yaitu kognisi, tanggapan pelaksana, dan

intensitas respon dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Keempat, fokus struktur birokrasi SOP pelaksanaan telah tersedia, namun terdapat SOP pelaksanaan yang belum dilaksanakan sehingga belum terimplementasikan dengan baik dalam kegiatan Magang MSIB. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka program MSIB pada kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur belum terimplementasi dengan optimal secara keseluruhan.

**Kata Kunci: Implementasi; MBKM; MSIB; Magang**

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh manusia dan telah disepakati oleh setiap negara. Kualitas pendidikan dalam suatu negara merupakan penentu kemajuan dari negara tersebut (Kurniawati, 2022). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin baik pula kualitas SDM di suatu negara. Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini dinilai belum mampu menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Sekitar 12% pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan Diploma dan Sarjana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya *link and match*. *Link and match* adalah relevansi kompetensi atau pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja atau industri. Melalui *link and match*, maka secara konseptual perguruan tinggi akan melahirkan lulusannya menjadi calon tenaga kerja yang memiliki profesionalisme tinggi dengan peluang yang cukup besar. Oleh karena itu, pada tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim merilis kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah suatu wujud pembelajaran yang bersifat otonom dan fleksibel sehingga akan menciptakan kultur belajar yang kreatif, inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa memahami tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat kemampuan akademik serta memberikan tantangan dan peluang yang sangat berharga dalam menciptakan kreativitas, potensi, kebutuhan mahasiswa dalam menemukan informasi melalui pengalaman nyata dalam dunia profesional (Kusnadi et al., 2022). Magang dan Studi Independen merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka pada kebijakan keempat. Program MSIB dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Magang Bersertifikat dan Studi Independen. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Wijayanto & Wulandari, 2023) menyatakan bahwa pelaksanaan MBKM pada beberapa universitas mengalami kendala dalam hal penyesuaian kurikulum, sistem informasi akademik, dan pendanaan bagi mahasiswa. Sedangkan pada penelitian implementasi kebijakan MBKM di FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur oleh (Puspitasari & Nugroho, 2021), menyatakan bahwa kebijakan MBKM kurang efektif dan belum terimplementasikan dengan baik. Kemudian, penelitian pada Kebijakan Kampus Merdeka Program Magang dan Studi Independen di Indonesia oleh (Rahman et al., 2023), menyatakan bahwa terdapat faktor penghambat yaitu belum adanya standarisasi konversi kredit SKS, aksesibilitas helpdesk yang lemah, dan dukungan dari pihak kampus terhadap program-program yang belum optimal.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur, UPN “Veteran” Jawa Timur juga turut berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia melalui program MSIB. Pada tahun 2023, UPN “Veteran” Jawa Timur telah menerima penghargaan keunggulan IKU PTN-BLU IKU 1 yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak serta Keunggulan IKU PTN-BLU IKU 2 yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. IKU atau Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja baru untuk

mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran yang lebih konkret (Ambarita, 2023). Salah satu fakultas yang melaksanakan program MSIB adalah Fakultas Pertanian atau FAPERTA. Keterserapan lulusan dapat dilihat dari *tracer study* alumni (Trimurtini et al., 2019). Hasil *tracer study* akan membantu perguruan tinggi untuk mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Berikut merupakan data *tracer study* dari UPA PKK UPN “Veteran” Jawa Timur terkait dengan waktu tunggu bekerja lulusan UPN “Veteran” Jawa Timur sebelum adanya program MSIB pada tahun 2021:

Tabel 1. Waktu Tunggu Lulusan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022

Fakultas	Prodi	Waktu Tunggu Bekerja (bulan)		Rata-rata waktu tunggu bekerja per fakultas	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
	Ekonomi			2,3	1,3
Ekonomi dan Bisnis	Pembangunan	1,9	1		
Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	2,5	1		
Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	2,4	2		
Pertanian	Agribisnis	2,5	1	2,5	1
Pertanian	Agroteknologi	2,5	1		
Teknik	Teknik Kimia	2,4	1	2,4	1,4
Teknik	Teknik Industri	2,5	1		
Teknik	Teknologi Pangan	2,4	2		
	Teknik				
Teknik	Lingkungan	2,5	1		
Teknik	Teknik Sipil	2,4	2		
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik	2,5	1	2,5	1,2
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Bisnis	2,5	1		
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	2,4	2		
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional	2,5	1		
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Pariwisata	-	-		
Arsitektur dan Desain	Arsitektur	2,5	2	2,5	1,5
	Desain				
Arsitektur dan Desain	Komunikasi Visual	2,5	1		
Hukum	Hukum	2,5	1	2,5	1
Ilmu Komputer	Informatika	2,5	2	2,5	1,5
Ilmu Komputer	Sistem Informasi	2,5	1		
Total rata-rata waktu tunggu bekerja				2,4	1,2

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021, rata-rata waktu tunggu bekerja lulusan UPN “Veteran” Jawa Timur adalah 2.4 bulan. Rata-rata waktu tunggu bekerja terlama pada Fakultas Pertanian, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Arsitektur dan Desain, dan Ilmu Komputer dengan rata-rata 2.5 bulan. Sedangkan waktu tunggu bekerja tersingkat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu 2.3 bulan setelah lulus. Waktu tunggu bekerja ini masuk kedalam Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dituangkan dalam Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU PTN) yang terbagi menjadi 8 poin.

Selain waktu tunggu, kesesuaian antara bidang pendidikan dan pekerjaan juga perlu diperhatikan. Perguruan tinggi harus memberikan pembelajaran yang fleksibel dengan metode pembelajaran efektif kepada mahasiswa untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi arus globalisasi pada berbagai bidang keahlian. Pembelajaran diluar kampus perlu diterapkan sesuai dengan IKU 2 perguruan tinggi untuk mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja saat ini. Berdasarkan data hasil *tracer study* UPA PKK UPN “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2022 ditemukan bahwa Fakultas Arsitektur dan Desain memiliki keselarasan horizontal alumni yang tinggi yaitu sebesar 89,35%. Sedangkan Fakultas Pertanian memiliki ketidak selarasan paling tinggi yaitu sebesar 38,03%. Keselarasan horizontal bidang pendidikan dengan bidang pekerjaan ini dapat dipersiapkan mahasiswa melalui program MSIB. Salah satu tujuan dari program MSIB adalah meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan *soft skills* mahasiswa.

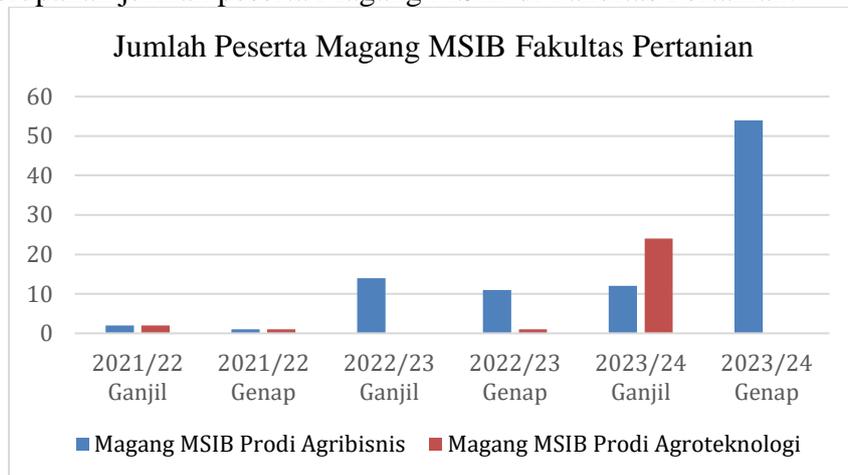
## Metode

Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur. Hal ini karena alumni mahasiswa FAPERTA memiliki waktu tunggu bekerja yang lama serta memiliki ketidakselarasan horizontal yang tinggi antara bidang pendidikan dan pekerjaan dibandingkan dengan fakultas lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif dikarenakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan MBKM pada Kegiatan Magang Bersertifikat Program MSIB di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur, dimana peneliti mendeskripsikan fenomena-fenomena secara mendalam dan menyeluruh sehingga data yang dianalisis berbentuk deskriptif. Fokus penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dikembangkan oleh Edward III dalam (Anggara, 2014) yaitu terdapat empat fokus yang menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu melalui informan Tim MBKM FAPERTA, dokumen teknis MBKM, dan catatan lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu melalui laporan, jurnal, buku, arsip dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2018). Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif (Miles & Huberman, 2014) yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah suatu wujud pembelajaran yang bersifat otonom dan fleksibel sehingga akan menciptakan kultur belajar yang kreatif, inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebijakan ini mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi. UPN “Veteran” Jawa Timur melaksanakan program MSIB angkatan pertama dimulai pada tahun 2021. Salah satu fakultas di UPN “Veteran” Jawa Timur yang melaksanakan Kebijakan MBKM program MSIB pada kegiatan Magang Bersertifikat adalah FAPERTA. Fakultas Pertanian saat ini memiliki 2 program studi jenjang S-1, yaitu Agroteknologi dan Agribisnis. Pada tahun 2023, jumlah pendaftar kegiatan Magang Bersertifikat berdasarkan laporan Koordinator PT oleh Romadhona 2003, angkatan 4 di FAPERTA adalah sebanyak 1.798 mahasiswa dan peserta lolos kegiatan Magang Bersertifikat di FAPERTA adalah sebanyak 15 mahasiswa. Persentase kelulusan yang didapatkan pada FAPERTA adalah 0,0083. Persentase kelulusan ini sangat kecil jika dibandingkan dengan data persentase kelulusan pada fakultas lainnya. Berikut merupakan jumlah peserta Magang MSIB di Fakultas Pertanian:



Gambar 1. Jumlah Peserta Magang MSIB di Fakultas Pertanian  
Sumber: Fakultas Pertanian yang diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan data diatas, dalam diagram batang tersebut dijelaskan pada angkatan pertama terdapat masing-masing 2 mahasiswa prodi Agribisnis dan Agroteknologi peserta Magang MSIB, pada angkatan kedua terdapat masing-masing 1 mahasiswa prodi Agribisnis dan Agroteknologi peserta Magang MSIB, pada angkatan ketiga terdapat 14 mahasiswa prodi Agribisnis peserta Magang MSIB, pada angkatan keempat terdapat 11 mahasiswa prodi Agribisnis dan 1 mahasiswa prodi Agroteknologi peserta Magang MSIB, dan pada angkatan kelima yaitu sebanyak 54 mahasiswa prodi Agribisnis peserta Magang MSIB. Dari diagram tersebut, dapat diketahui jumlah mahasiswa peserta Magang Bersertifikat meningkat setiap angkatanannya.

Berdasarkan buku panduan pelaksanaan program MSIB tahun 2023 oleh Kemendikbud yaitu tahapan pelaksanaan program MSIB terdiri dari pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan. Implementasi kebijakan menurut Edward III adalah salah satu tahapan pada proses pembuatan kebijakan antara pembentukan satu kebijakan dan akibat yang timbul dari kebijakan tersebut terhadap orang-orang yang terkena dampaknya (Nurdin, 2019). Edward III mengemukakan empat fokus penting dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan MBKM pada kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB akan diuraikan berdasarkan teori implementasi oleh Edward III yaitu:

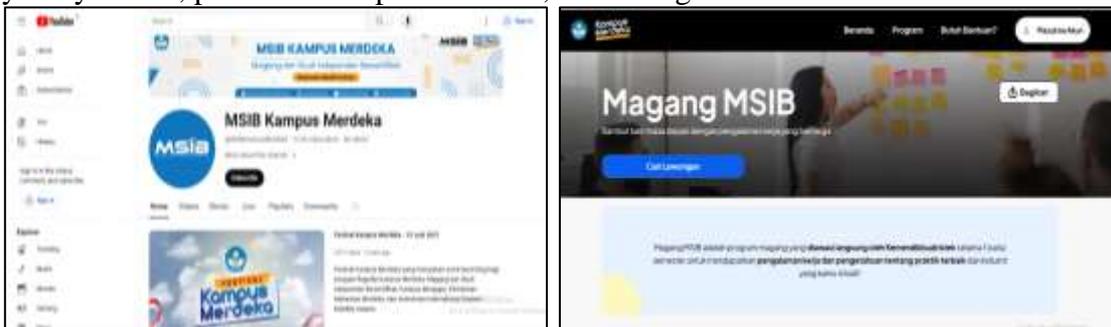
## 1. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam suatu proses implementasi kebijakan. Van Meter & Van Horn dalam (Nurdin, 2019) memandang komunikasi baik secara internal maupun eksternal sebagai proses yang rumit dan sukar. Mereka pun memberikan gambaran jelas bahwa dalam menyebarkan pesan atau informasi dalam suatu

organisasi, maupun antar organisasi, juru komunikasi bisa saja mengubah makna baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Jika informasi mengenai ukuran dan tujuan kebijakan yang disampaikan berbeda dengan informasi yang sebenarnya, maka hal tersebut tentu akan menimbulkan kesalahpahaman (R. Hidayat et al., 2014). Sehingga, para implementor tentu akan kesulitan dalam mencari makna dari kebijakan yang akan mereka implementasikan. Oleh karena itu, implementasi yang efektif akan tercapai melalui kejelasan mengenai rumusan standar dan tujuan serta ketepatan dan kekonsistensian dengan siapa mereka berkomunikasi (Rizkiyani & Ismayanti, 2023). Menurut Edward III komunikasi terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Baskoro & Hertati, 2022). Berikut merupakan uraian sasaran kajian dari komunikasi:

#### a. Transmisi

Pada sasaran kajian transmisi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis dengan koordinator PT UPN “Veteran” Jawa Timur dapat diketahui bahwa proses penyaluran informasi antara Kemendikbud dengan Koordinator PT dilakukan melalui media zoom dalam kegiatan pembekalan Koordinator PT dan Sapa Koordinator. Kemudian Koordinator menyampaikan informasi kepada para pelaksana di tingkat prodi Fakultas Pertanian. Penyaluran informasi oleh Kemendikbud kepada mahasiswa sebagai sasaran kebijakan dilakukan melalui media sosial magang merdeka yaitu youtube, platform Kampus Merdeka, dan Instagram.



Gambar 2. Penyaluran Informasi Kegiatan Magang MSIB Melalui Media Sosial  
Sumber: Youtube MSIB Kampus Merdeka dan Platform Kampus Merdeka (2024)

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui proses penyampaian informasi mengenai kegiatan Magang MSIB dilakukan oleh Kemendikbud kepada mahasiswa melalui website Kampus Merdeka. Dalam website Kampus Merdeka terdapat informasi mengenai cara mendaftar, syarat dan ketentuan mendaftar, seleksi dan penerimaan, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Selain itu, terdapat juga media sosial yang membantu mensosialisasikan kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB yaitu media Instagram. Penyampaian informasi oleh media Instagram menyampaikan informasi mengenai pembukaan program MSIB, pelaksanaan offering mitra, pengumuman mengenai segala pelaksanaan program MSIB, penyampaian pengetahuan mengenai program MSIB, tips mengenai pendaftaran MSIB, dan sosialisasi program kepada para pelaksana dan sasaran kebijakan.

#### b. Kejelasan

Pada sasaran kajian kejelasan, berdasarkan hasil wawancara dengan tim MBKM FAPERTA dapat diketahui bahwa kejelasan informasi yang diberikan oleh Kemendikbud sudah memuat maksud, tujuan, dan cara pelaksanaan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada kegiatan Magang Bersertifikat. Pada proses koordinasi para pelaksana kebijakan terdapat kendala pada tahapan pra pelaksanaan yaitu pada kegiatan konsolidasi mitra. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam pra pelaksanaan adalah pelaksanaan Konsolidasi Mitra. Proses konsolidasi adalah proses kesepakatan antara Mitra dengan perwakilan Perguruan Tinggi. Dalam proses konsolidasi, Mitra

menjelaskan gambaran program kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahasiswa beserta Capaian Pembelajaran Program (CPP), rancangan pembelajaran, dan metode evaluasi yang akan dilakukan terhadap Mahasiswa yang mengikuti Program MSIB di Mitra tersebut. Tetapi, perwakilan tim MBKM Fakultas Pertanian tidak menghadiri kegiatan konsolidasi mitra.

Terdapat ketidakjelasan informasi terkait dengan jadwal konsolidasi mitra yang tidak disampaikan oleh mitra kepada dosen penggerak. Jika mitra tidak menyampaikan jadwal konsolidasi yang diadakan, maka perguruan tinggi tidak dapat menghadiri konsolidasi mitra dari mahasiswa yang telah diterima dalam skema kegiatan magang tersebut. Perguruan tinggi tidak akan mengetahui gambaran program kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa beserta Capaian Pembelajaran Program (CPP), rancangan pembelajaran dan metode evaluasi yang akan dilakukan terhadap mahasiswa yang mengikuti program MSIB di mitra tersebut. Melalui kegiatan konsolidasi mitra, perguruan tinggi dapat menentukan pengakuan sks yang diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang di mitra tersebut.

### **c. Konsistensi**

Pada sasaran kajian konsistensi, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan mahasiswa Faperta dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan oleh tim MBKM pada prodi Agribisnis dalam konversi sks sudah sesuai dan konsisten sejak awal. Sedangkan informasi yang diberikan oleh tim MBKM pada prodi Agroteknologi dalam konversi sks tidak sesuai dan tidak konsisten sejak awal. Hal ini sangat membingungkan para peserta Magang MSIB selaku sasaran kebijakan.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaik apapun konsep kebijakan yang dirumuskan dan seakurat apapun informasi kebijakan yang dikomunikasikan, jika tanpa adanya dukungan sumber daya yang relevan, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan memiliki hasil guna (Nurdin, 2019). Terdapat empat sasaran kajian dalam sumber daya implementasi kebijakan, yaitu staf, informasi, fasilitas, serta kewenangan (Nainggolan et al., 2023). Berikut merupakan uraian sasaran kajian dari sumber daya:

### **a. Staf**

Pada sasaran kajian staf, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa tim MBKM Fakultas Pertanian telah memiliki kecakapan dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu merupakan tenaga pendidik atau dosen di Fakultas Pertanian sehingga dapat direkomendasikan oleh rektor untuk menjadi pengurus dalam tim MBKM. Namun, terdapat nama staf yang tidak selaras dalam pelaksanaan kegiatan dengan SK Rektor tim MBKM. Selain itu, jumlah staf Koordinator PT yang terlalu sedikit dibandingkan dengan peserta MSIB yang telah diatur dalam Buku Panduan Program MSIB. Dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program MSIB Kemendikbud RI menyatakan bahwa jika terdapat lebih dari 100 Mahasiswa dari Perguruan Tinggi tersebut yang lolos dalam Program Magang atau Studi Independen, maka Perguruan Tinggi dapat merekomendasikan 4 (empat) Koordinator PT. menurut data laporan Koordinator PT dari Ibu Rizka Hadiwiyanti tahun 2023 jumlah peserta Magang Bersertifikat sebanyak 343 peserta. Kemudian jumlah koordinator PT hanya 2 orang. Sehingga dapat diamati bahwa jumlah koordinator PT tidak mencukupi dalam melaksanakan dan monitoring kegiatan Magang Bersertifikat. Pada sasaran kajian staf dapat dinyatakan belum terimplementasi dengan baik.

## b. Informasi

Pada sasaran kajian informasi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa telah tersedia informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Magang. Informasi ini dapat diperoleh melalui Buku panduan pelaksanaan program MSIB, petunjuk teknis kegiatan magang UPN “Veteran” Jawa Timur dan panduan implementasi program MSIB prodi Agribisnis. Informasi kegiatan Magang Bersertifikat melalui Buku Panduan Pelaksanaan Program MSIB telah jelas diperoleh mengenai tujuan program, sasaran program, indikator keberhasilan, karakteristik program, pihak terkait program MSIB, proses rekrutmen peserta, tahapan pelaksanaan program, pengakuan dan penyetaraan sks, penjaminan mutu, administrasi dan keuangan, kewajiban pihak terkait, larangan dan sanksi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Magang diatur melalui petunjuk teknis yang disusun oleh tim MBKM. Dalam petunjuk teknis ini telah diatur informasi mengenai pelaksanaan program magang di UPN “Veteran” Jawa Timur, skema program magang Kampus Merdeka, peran para stakeholder magang, proses pembimbingan program magang, pedoman penulisan laporan magang, penilaian magang dan etika magang.

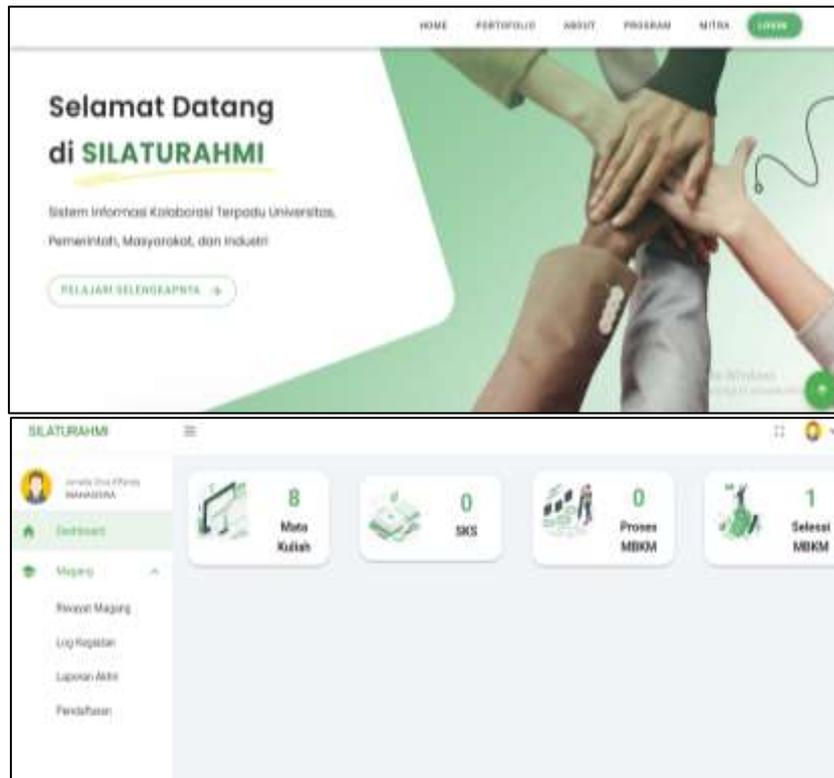


Gambar 3. Tampilan buku Panduan Pelaksanaan Program MSIB

Sumber: Buku panduan pelaksanaan program MSIB 2023

## c. Fasilitas

Pada sasaran kajian fasilitas, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa telah tersedia fasilitas dalam menunjang kegiatan Magang MSIB yaitu platform Kampus Merdeka yang membantu Kemendikbud untuk sosialisasi dan monitoring kegiatan Magang Bersertifikat. Menurut (Kasmad, 2018), Fasilitas pendukung sarana dan prasarana adalah faktor penting. Fasilitas-fasilitas dimaksudkan disini menyangkut ketersediaan sarana fisik yang mendukung terlaksananya suatu kebijakan. Dalam hal ini fasilitas dalam menunjang kegiatan Magang MSIB. Kemudian terdapat platform Silaturahmi yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam monitoring pelaksanaan Magang MSIB. Berikut merupakan tampilan dari platform Silaturahmi:



Gambar 4. Tampilan Platform Silaturahmi  
 Sumber: <https://silaturahmi.upnjatim.ac.id>

Berdasarkan gambar diatas, platform Silaturahmi memudahkan mahasiswa dan dosen dalam monitoring pelaksanaan Magang MSIB yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Pada platform ini tim MBKM dapat melakukan monitoring kegiatan peserta magang, melakukan evaluasi kegiatan, dan memverifikasi nilai kegiatan magang mahasiswa.

#### d. Kewenangan

Pada sasaran kajian kewenangan, berdasarkan hasil wawancara dengan tim MBKM FAPERTA dapat diketahui bahwa UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki kewenangan dalam komposisi nilai mahasiswa kegiatan Magang MSIB yaitu 60% nilai mitra dan 40% nilai prodi. Komposisi nilai ini untuk mengkonversi nilai mitra kedalam mata kuliah yang akan dikonversi. Prodi Agroteknologi dan Agribisnis telah melaksanakan kewenangan yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Handayani et al., 2022). Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, serta intensitas respons/tanggapan pelaksana (Ardhana & Hertati, 2021). Berikut merupakan uraian sasaran kajian dari disposisi:

#### a. Kognisi

Pada sasaran kajian kognisi, berdasarkan hasil wawancara dengan sasaran kebijakan yaitu mahasiswa FAPERTA yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa para pelaksana kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur yaitu Koordinator PT, PIC MBKM prodi Agribisnis dan tim MBKM Agroteknologi telah memahami tugas masing masing posisi

pelaksana. Selain itu, pelaksana kebijakan telah memahami tujuan dari program MSIB yaitu untuk meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan soft skills mahasiswa melalui kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB. Edward III sebagaimana dikutip dalam (Mayunita, Gazalin, & Bobby, 2023) menyatakan bahwa tingkat pemahaman para aktor kebijakan sangat penting dalam keberhasilan implementasi.

#### **b. Arahan Dan Tanggapan Pelaksana**

Pada sasaran kajian arahan dan tanggapan pelaksana, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan dari Koordinator PT, PIC MBKM prodi Agribisnis, tim MBKM prodi Agroteknologi, menerima secara positif kegiatan Magang Bersertifikat dan mendukung secara penuh agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan Magang Bersertifikat. Selain itu, mahasiswa sebagai sasaran kebijakan juga menerima secara positif karena mahasiswa mendapat peluang untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Sehingga pada sasaran kajian arahan dan tanggapan pelaksana dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB telah menerima dan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku serta dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik.

#### **c. Intensitas Respon**

Pada sasaran kajian intensitas respon, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa intensitas respon pelaksana kebijakan telah melakukan sosialisasi terus menerus pada setiap angkatan kegiatan Magang MSIB.



Gambar 5. Sosialisasi Magang MSIB di Fakultas Pertanian  
Sumber : Tim MBKM FAPERTA (2024)

Berdasarkan gambar sosialisasi magang MSIB diatas, hasil dari sosialisasi menyatakan bahwa mahasiswa telah merespon kegiatan Magang secara positif dan peserta MSIB meningkat setiap angkatannya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh prodi Agribisnis oleh PIC MBKM prodi Agribisnis yaitu Bapak Mirza Andrian Syah S.P, M.P. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh PIC MBKM prodi Agribisnis:



Gambar 6. Sosialisasi Program MSIB Prodi Agribisnis

Sumber : Dokumentasi internal tim MBKM prodi Agroteknologi

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa bahwa prodi Agribisnis telah melaksanakan sosialisasi kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB kepada para mahasiswa secara konsisten dan terus menerus. Menurut Edward III sebagaimana dikutip oleh (Baskoro & Hertati, 2022; Ratnawati, 2023) bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan harus terdapat komitmen yang kuat dari petugas dengan intens dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga pada sasaran kajian ini dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB di Fakultas Pertanian telah memberikan respon secara intens dan terus menerus dilakukan untuk mendorong mahasiswa melakukan kegiatan MBKM serta sudah terimplementasi dengan baik.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi terlebih dalam melaksanakan sebuah kebijakan (Mayunita et al., 2023). Menurut Edward III terdapat dua karakteristik penting dalam birokrasi yaitu standar operasional prosedur dan fragmentasi (Husain & Hertati, 2023). Berikut merupakan uraian sasaran kajian dari struktur birokrasi:

##### **a. Standar Operasional Prosedur**

Pada sasaran kajian SOP, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa SOP implementasi kebijakan MBKM program MSIB pada kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur mengacu pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat oleh tim MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur. Berikut merupakan SOP pelaksanaan kegiatan Magang Bersertifikat:



Gambar 7. SOP Pelaksanaan Magang Bersertifikat MSIB

Sumber : Buku petunjuk teknis program Magang UPN “Veteran” Jawa Timur

Gambar diatas merupakan SOP dalam pelaksanaan Magang MSIB di UPN “Veteran” Jawa Timur. SOP ini menjelaskan alur pelaksanaan MSIB bagi mahasiswa. Dalam pelaksanaan MSIB, setiap program studi dapat mengacu pelaksanaannya pada SOP sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat. Pada prodi Agroteknologi terdapat satu tahapan yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu mahasiswa yang tidak melakukan konsultasi dengan dosen wali dalam memilih suatu program MBKM.

Sedangkan, pada program studi Agribisnis terdapat SOP tersendiri dalam pelaksanaan Magang MSIB. Namun, pada program studi Agribisnis juga terdapat kendala dalam pelaksanaan SOP yaitu khususnya pada bagian pembekalan. Berikut merupakan SOP pelaksanaan Magang MSIB pada program studi Agribisnis:



Gambar 8. SOP Pelaksanaan MBKM prodi Agribisnis

Sumber: Dokumen internal prodi Agribisnis 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mirza Andrian Syah S.P, M.P. selaku PIC MBKM menyatakan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan SOP yaitu khususnya pada bagian pembekalan yang belum dilaksanakan secara konsisten karena waktu yang bertabrakan.

## **b. Fragmentasi**

Pada sasaran kajian Fragmentasi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan MBKM program MSIB pada kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur terdapat struktur pelaksana yang jelas dan tertulis tentang tim pengelola program MBKM. Tim MBKM telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur nomor 29/UN63.9/LP3M/2024 tentang Tim MBKM dan Pengelola Silaturrahi. Dalam SK tersebut telah ditetapkan masing-masing tim yang bertugas dalam mengelola MBKM. Disebutkan juga jabatan dan tugas tiap tim serta peran dalam silaturrahi. Menurut Edward III sebagaimana yang dikutip melalui (E. Hidayat, 2021) bahwa fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, pembagian tugas dan struktur pelaksana kegiatan Magang Bersertifikat MSIB telah jelas dan transparan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terkait implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka program MSIB di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur, maka penulis dapat menarik yaitu pertama, pada fokus komunikasi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi namun belum dilakukan dengan baik. Proses penyaluran atau transmisi komunikasi kebijakan Magang MSIB telah memuat maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Tetapi tidak terjadi kejelasan dalam proses koordinasi pelaksana kebijakan antara Koordinator PT dan tim MBKM prodi dalam proses konsolidasi. Selain itu, tidak terjadi konsistensi dalam penyampaian informasi konversi sks dari tim MBKM kepada mahasiswa sehingga informasi luaran yang diterima berubah-ubah. Kedua, fokus sumber daya dapat dinyatakan bahwa implementasi kegiatan Magang Bersertifikat belum terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Informasi dapat diperoleh melalui Buku panduan pelaksanaan program MSIB, petunjuk teknis kegiatan magang UPN “Veteran” Jawa Timur dan panduan implementasi program MSIB prodi Agribisnis. Fasilitas yang mendukung kegiatan Magang MSIB adalah platform Kampus Merdeka dan Silaturrahi. Kemudian UPN “Veteran” Jawa Timur telah memiliki wewenang dalam komposisi nilai. Namun, terdapat jumlah staf Koordinator PT yang kurang memadai dan tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa peserta Magang MSIB.

Ketiga, pada fokus disposisi dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Koordinator PT, PIC MBKM prodi Agribisnis dan tim MBKM Agroteknologi telah memahami tugas masing-masing posisi pelaksana. Selain itu, pelaksana kebijakan telah menerima secara positif kegiatan Magang Bersertifikat dan mendukung secara penuh agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan Magang Bersertifikat. Kemudian intensitas respon, pelaksana kebijakan telah melakukan sosialisasi terus menerus pada setiap angkatan kegiatan Magang MSIB. Keempat, pada fokus struktur birokrasi belum terimplementasikan dengan baik dalam kegiatan Magang MSIB. Pelaksanaan kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur telah terdapat standar operasional prosedur yang jelas. Namun dalam pelaksanaannya terdapat salah satu tahapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, telah terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab kerja diantara para pelaksana kebijakan yaitu Koordinator PT sebagai PIC MSIB di UPN “Veteran” Jawa Timur, Tim MBKM sebagai perancang dan PIC MBKM Prodi, dan penilai konversi sebagai tim penilai MBKM prodi. Dengan demikian implementasi kebijakan Kampus Merdeka program MSIB pada kegiatan Magang Bersertifikat belum terimplementasi dengan optimal secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

- Ambarita, I. S. (2023). Strategi Peningkatan Capaian Iku-2 Pada Program MBKM di Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Palangka Raya. *Jurnal Idaarah*, VII(1), 214–223.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia
- Ardhana, R., & Hertati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket Implementation Of Minimarket Arrangement Policy Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Mela- Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Ta. *Governansi*, 7, 131–142.
- Baskoro, A. G., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tentang Penanganan Banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 112–124.
- Handayani, Y., Ariany, R., & Ameliza, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Retribusi Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 256–268.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136.
- Hidayat, R., Idris, A., & Masjaya. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. *Jurnal Administratif Reform*, 2(2), 174–186.
- Husain, I. A., & Hertati, D. (2023). Policy Implementation for Reducing the Use of Plastic Bags. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 233–241.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13.
- Kusnadi, E., Nur'aeni, N., Asrofi, I., Ramadani, R., & Lutfi, K. M. (2022). Respon Mahasiswa dalam Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3595–3603.
- Mayunita, S., Gazalin, J., & Boby, F. H. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara). *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 203–213.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16.
- Nurdin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. In Maulana Media Grafika.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip Upn Veteran Jawa Timur. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 276–292.
- Rahman, A., Sukmajati, D. C., Mawar, M., Satispi, E., & Gunanto, D. (2023). Implementasi Kebijakan pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 266–291.

- Ratnawati, N. N. S. (2023). Implementation of Flipped Classroom as Student-Centered Learning Implementation in Awatara Learning of 7 Grade At SMP Negeri Satap 2 Kintamani. *International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 56-68.
- Rizkiyani, T., & Ismayanti. (2023). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Desa Petir Kabupaten Serang. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 20(September), 107–120.
- Trimurtini, Muslikah, & Wahzudik, N. (2019). Analisis Kualitas Lulusan Hasil Tracer Study pada Pengguna Lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan. *Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 10(1), 1–6.
- Wijayanto, B., & Wulandari, F. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka : Sebuah Systematic Review. *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 8, 164–184.